

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang atau konflik saudara Suriah atau merupakan kelanjutan dari revolusi Suriah yang juga bagian dari rentetan peristiwa revolusi “Arab Spring”. Berawal dari demonstrasi desakan turunya rezim penguasa, revolusi Suriah berbuntut panjang menjadi perang berdarah dan paling banyak memakan korban jiwa dan masih berlangsung hingga sekarang. Turki merupakan salah satu negara yang terdampak akibat konflik ini, terutama dalam permasalahan pengungsi perang paska Uni Eropa menawarkan bantuan tahun 2015 yang akhirnya membuat pengungsi membludak mencapai angka 2,5 juta jiwa pada akhir tahun (BBC, Why don't Syrian refugees stay in Turkey?, 2016), dari yang awalnya hanya 160.000.

Menyikapi terjadinya instabilitas tetangganya, Turki awalnya tidak diam. Para pejabat Turki berupaya menginisiasi upaya damai dengan mendorong pemerintah Suriah untuk sesegera mungkin mereformasi sistem pemerintahan, tetapi lambat laun sikap Turki berubah memusuhi Suriah dengan mengusir dubes Suriah di Ankara dan melaporkan pemerintah Suriah ke dewan keamanan PBB atas kejahatan kemanusiaan (Kuncahyono, 2013, p. 200)

Sebelumnya juga terdapat laporan bahwa, secara diam-diam pemerintah banyak memberi bantuan kepada kelompok oposisi yang beroperasi di luar negeri. Dan parahnya intelijen Turki juga memfasilitasi, memberi suplai persenjataan dan

membantu pendirian para mantan tentara Suriah yang membelot untuk mendirikan Tentara Pembebasan Suriah atau FSA (*Free Syrian Army*) (Syria's opposition has been led astray by violence, 2012), dibantu Arab Saudi dan Qatar. Tentara pembebasan sendiri adalah sebuah kelompok oposisi yang juga merangkul militan sipil bersenjata serta bertanggung jawab atas jalur kekerasan yang dipilih untuk melawan rezim, hingga Suriah terjerumus dalam medan pertempuran berdarah.

Jika membicarakan alasan Turki melakukan itu. Sebenarnya Turki sendiri dinilai sangat ambisius menjadi kekuatan utama (*Central Power*) di Timur Tengah. Semenjak tahun 2002 saat Partai Keadilan Pembangunan menguasai kursi pemerintahan negara, Turki menjadi sangat ambisius dengan melakukan berbagai strategi politik luar negeri. Awalnya Turki menerapkan politik “nol-masalah dengan tetangga” (*Zero Problems with Neighbours*) dengan berorientasikan kerjasama ekonomi dan pengurangan pendekatan militer dengan negara tetangga termasuk Suriah (D’Alema, 2017, hal. 3-6). Namun peristiwa Arab Spring membuat strategi tersebut menjadi goyah, yang pada awalnya menggunakan cara diplomasi lunak menjadi diplomasi menekan.

Setidaknya beberapa asumsi menyebutkan bahwa Arab Spring membuat politik luar negeri Turki berubah menjadi “Neo Ottomanisme” atau mengembalikan citra Turki seperti pada masa kejayaan Ottoman dahulu sebagai kekuatan dunia Islam. Menurut (ÖNİŞ,2012), Turki memiliki modal di depan panggung politik negara-negara kawasan dengan hawa otoritarianisme dan

sekularisme, sebagai model negara alternatif demokratis dan islamis yang selama ini diidamkan oleh para pemberontak rezim.

Strategi politik luar negeri itu membuat tujuan Turki dalam perang Suriah menjadi sangat jelas dan murni dengan tujuan meruntuhkan Bashar al Assad dan mendukung penuh pergantian rezim, walaupun kedua negara tersebut sangat dalam kondisi damai dan sangat baik sebelum revolusi Suriah. Keputusan Turki tersebut merupakan peluang penuh beresiko. Hal tersebut pula yang menganggap keberadaan Suriah tidak berbeda jauh dengan negara Arab Spring lainnya seperti skenario Mesir bahkan Libya yang sempat terjadi konflik saudara.

Namun kenyataannya jauh berbeda. Karena semakin lama, perang saudara Suriah lambat laun berkembang dan masalah yang dihadapi Turki juga semakin kompleks. Setidaknya muncul kelompok militan lain seperti ISIS dan militan Kurdi, yang sama kuatnya dalam konflik dan mendirikan kubu tersendiri di luar militan pemerintah dan anti pemerintah. Hadirnya dua kelompok tersebut menjadi masalah bagi Turki, karena posisi geografisnya yang tidak jauh, dan ISIS menjadikan Turki sebagai gerbang militan dari segala penjuru dunia untuk menjadi militan ISIS. Sedangkan Kurdi menjadi masalah bagi Turki karena sejak dahulu Turki memiliki permasalahan yang belum selesai dengan militan Kurdi di negaranya.

Militan kurdi Suriah sebenarnya memiliki posisi yang unik dimana mereka memanfaatkan situasi perang untuk membentuk wilayah sendiri (*self determination*) yang sejak perjuangan. Militan kurdi telah bergerak sejak awal

konflik lebih tepatnya pada tahun 2012 dimana Partai Uni Demokratik (*Partiya Yekitiya Demokrat* atau PYD) sebagai representasi politik Kurdistan Suriah mendirikan revolusi sosial yang mereka sebut “Rojava”. Wacana dalam Revolusi Rojava adalah mendirikan daerah konfederasi demokratik di utara Suriah yang berisikan institusi pemerintahan termasuk tentara sendiri selayaknya negara demokratis walau tetap dibawah oleh Suriah, membangun kehidupan sosial yang berkelanjutan dan sekekuler lewat kontrak sosial (*Social Contract*) dan kemandirian ekonomi (Sarican & Biehl, 2018). Untuk urusan keamanan dan pertahanan, Partai PYD mengangkat unit perlindungan rakyat (*Yekiniyen Parastina Gell*) atau YPG, yang juga sudah berdiri lama bersamaan dengan PYD sebagai militan geriliya Kurdi di Suriah.

Rojava tidak memiliki status tetap yang diakui oleh pemerintah Suriah dan komunitas internasional, walaupun sebelum menggagas revolusi Rojava, PYD pernah terlibat sebagai anggota koalisi koordinasi nasional atau NCC (*National Coordination Body for Democratic Change*) yang merupakan wadah dialog internal pihak oposisi yang memerangi pemerintah dan akhirnya memutuskan keluar (Allsopp, 2015, hal. 246-248). Pemerintah dan oposisi anti pemerintah saling menuduh tentang posisi militan Kurdi berada disebelah pihak, oposisi menganggap orang kurdi merupakan mata mata bagi Bashar Al Assad karena pernah memiliki hubungan baik dimasa sebelum konflik (*Ibid*, Kuncahyono, 2013, p. 106) dan media The Economist juga pernah menganalisa hubungan Kurdi dan Bashar memiliki kedekatan secara diam-diam (The Economist, 2016).

Namun perkembangan Rojava tidak begitu signifikan dan cukup tidak diindahkan oleh Turki, justru wilayahnya terus berkurang digempur ISIS hingga puncaknya pada akhir tahun 2015 di kota Kobane yang berdekatan Turki. Namun dalam waktu singkat kota ini dapat kembali direbut oleh YPG dalam masa 4 bulan, sekaligus menjadikan kota ini sebagai simbol dunia dalam melawan ISIS (Delmas, 2017).

Pertempuran di Kobane juga menjadi titik balik bagi kemunduran ISIS setelah tahun 2015 yang menjadi tahun terpenting bagi ekspansi ISIS yang begitu masif. Setelah pertempuran Kobane, YPG terus melakukan agresi dan pencaplokan wilayah baru dan kota-kota terpenting bagi ISIS termasuk Raqqa yang menjadi markas dan ibukota, bahkan hingga mencapai wilayah diluar dari populasi bangsa Kurdi itu sendiri (Vox Atlas, 2018) yang juga mendesak pemerintahan Rojava melakukan inisiasi beberapa perubahan nama menjadi Democratic Federation of Northern Syria atau DFNS walaupun istilah Rojava masih sering digunakan (Allsopp, 2015, hal. 283), Selain itu DFNS juga membentuk angkatan bersenjata demokratik atau SDF (Syrian Democratic Force) yang di komandoi oleh YPG yang juga menjadi koordinator bagi para militan non YPG yang ikut memerangi ISIS.

Berkembangnya wilayah DFNS sebagai representasi dari Kurdistan Suriah menjadi masalah Turki sebagai ancaman tak terkirakan sebelumnya. dikarena PYD maupun YPG sebagai instrumen terpenting bagi Rojava memiliki kedekatan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*). PKK dikenal

sebagai kelompok separatis dan ancaman disintegrasi bagi Turki. Selama ini PKK cukup banyak melakukan aksi gerilya lintas batas sehingga membuat kelompok ini terkenal dikalangan komunitas Kurdi di timur tengah, sebagai kelompok resistensi yang politik berpengaruh bagi gerakan politik Kurdistan domestik lain di luar Turki, seperti Suriah yang juga dihuni oleh orang Kurdi (*Ibid*, Vox Atlas, 2018).

Semasa Erdogan memerintah, Turki telah mencoba membuka hubungan damai dengan melakukan penuntasan masalah diskriminasi dan demokratisasi secara menyeluruh pada tahun 2013 (Alfian, 2018, hal. 126), karena permasalahan Kurdi belumlah tuntas. Namun kebangkitan yang begitu masif politik Kurdistan tunggangan PKK tidak diperhitungkan oleh Turki dalam konflik Suriah, karena Turki menganggap PKK wujud lain dari kelompok politik Kurdi serta menganggapnya sebagai kelompok teror dan tidak merepresentasikan politik orang Kurdi sesungguhnya.

Hal yang membuat kehadiran militan Kurdi tersebut juga dikarenakan negara barat bahkan AS menjadi penyokong terbesar persenjataan YPG karena melihat durabilitas pertahanan dan signifikansi agresi yang kuat dalam melawan ISIS. Setidaknya, Erdogan telah beberapa kali memperingatkan serta mengancam AS karena banyak berkerjasama dengan kelompok yang dianggap teroris tersebut.

Turki yang telah terlanjur masuk kedalam konflik dengan cara represif, sangat mungkin Turki menggunakan cara yang sama ataupun lebih ekstrim dalam berhadapan dengan militan dan aktor politik Kurdistan Suriah. Kemungkinan itu

menjadi kesempatan terlebih, dunia tidak begitu memperhatikan kemunculan politik Kurdistan sebagai bahaya sebagaimana ISIS. Setidaknya Turki berdiri sendiri menghadapi kemungkinan ancaman atas kehadiran Kurdistan Suriah dalam strategi strategi lanjutan di konflik Suriah. Tidak ada pilihan lain bagi Turki untuk mematikan gerakan YPG tersebut dan membangun *buffer zone* di wilayah Suriah

B. Rumusan Masalah

Melihat fenomena tersebut, penulis membuat pernyataan “*Bagaimana Strategi Turki dalam menghadapi militan Kurdi di Perang Suriah?*” sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Intervensi Militer

Intervensi militer memiliki pemahaman sederhana sebagai tindakan campur tangan urusan negara lain dengan mengirimkan pasukan militer ke negara tersebut, untuk memantapkan suatu rezim maupun ataupun mengubahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat James Rosenau dalam (Holsti & Azhary, 1988, hal. 9) yang mengatakan bahwa, intervensi merupakan bentuk lain dari tindakan negara sebagai suatu pemutusan tajam suatu bentuk hubungan yang konvensional, dan secara sadar diarahakan untuk mengubah atau mempertahankan stuktur politik di negara sasaran. K J Holsti mencatat, paska perang dunia negara melakukan tindakan intervensi biasanya terjadi pada saat terjadi revolusi dalam negeri dan kekacauan sipil yang akhirnya melibatkan negara lain, terlebih perang sipil juga

menjadi suatu instrumen negara besar dalam mempertaruhkan kepentingan politiknya hingga menyebabkan peperangan di negara sasaran menjadi perang proksi (*Proxy War*).

Intervensi biasanya merupakan tindakan yang sangat dramatik karena diorganisasikan secara baik dan taruhnya begitu besar, dan tidak hanya negara besar saja yang melakukan tindakan intervensi karena negara kecil sekalipun tetap banyak mempraktekan strategi ini untuk mencapai tujuan dan meningkatkan nilai politiknya (*Ibid*, Holsti & Azhary, 1988, hal. 3). Hal yang mendesak suatu negara melakukan intervensi baik menggunakan teknik militer maupun aksi sembunyi sembunyi adalah; pertama, karena tekanan diplomatik tradisional tidak mampu mengubah suatu negara dalam rencana dan program ekonomi militer yang di jalankan oleh negara luar atau organisasi internasional.; kedua, adanya tidak sesuaian batas wilayah, suku, agama ataupun kebahasaan diantara salah satu pihak, yang akhirnya menjerumuskan komponen tersebut kedalam satu konflik dan ikut menyeret pihak luar dalam melibatkan diri jika pemerintah pihak luar tersebut merasa perlu untuk mengubah atau meneruskan sturktur negara tersebut jika krisis tersebut juga ikut mengancam bagi salah satu pihak.

Ketiga, loyalitas politik pada lembaga atau penguasa yang kadang diarahkan oleh lembaga dan ideologi luar. Negara lain yang memiliki ikatan dengan dua hal tersebut terdesak karena adanya ancaman pada perubahan atau jika struktur tersebut dapat berubah.; Keempat, teknologi nuklir yang juga memaksa musuh dalam perang dingin untuk masuk kedalam intervensi secara terang terangan atau aksi sembunyi.; Dan kelima, ambisi revolusi yang lebih jauh ke

negara lain dengan tujuan penyebaran pengaruh nilai politik domestiknya ke tingkat luar batas negara.

Holsti juga membagi ada bentuk empat intervensi dan aksi sembunyi selain selain menggunakan instrumen militer, yaitu berbagai teknik tindakan rahasia, demonstrasi kekuatan, subversi dan gerilya yang didukung negara lain. Kelima hal tersebut biasanya digabungkan secara bersamaan pada suatu kasus. Sedangkan Martin Ortega (Military Intervention and European Union, 2001) memberikan setidaknya ada 10 evolusi dalam pola intervensi militer : Imperialistik, Kolonial, Perimbangan Kekuatan, Usaha Menentukan Nasib Sendiri, Pertahanan Diri, Pola Intervensi Perang Dingin, Intervensi Humaniter, Intervensi Kolektif, dan Intervensi Penghukuman.

Dalam Intervensi militer, biasanya negara tidak hanya melakukan ekspedisi militer secara besar besaran, melainkan juga membantu persenjataan pada pihak internal yang didukung dan terlibat konflik, baik oposisi maupun rezim yang bertahan. Intervensi militer biasanya merupakan akibat dari kemelut dan pasukan dikirim secara cepat kedalam konflik sebagai strategi intervensi.

Intervensi militer berbeda dengan invasi militer jika dilihat dari tujuannya, walaupun sama-sama menggunakan instrumen militer. Invasi militer lebih mengarah pada akuisisi dan penguasaan atau pencaplokan atau pendudukan wilayah dengan mengirimkan pasukan ke wilayah yang dituju guna menjadikan wilayah negara lain tersebut menjadi wilayah negaranya. Tetapi intervensi militer biasanya berupa ekspedisi membantu pertahanan ataupun mengubah dan sifatnya

temporal dan terbatas. Namun banyak kedua istilah tersebut banyak digunakan dalam satu istilah yang sama sebagai bentuk “Intervensi Militer”. Hanya saja perubahan itu terjadi beriringan dengan sejarah konflik dunia dan bentuk peralihan antara konflik tradisional yang biasanya menggunakan pola pendudukan dengan non tradisional non pendudukan dengan alasan yang kompleks.

Dalam konflik Suriah, Turki sebenarnya telah menunjukkan suatu intervensi secara diam-diam dengan memobilisasi oposisi bersenjata dimasa awal konflik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Turki tidak terlibat secara langsung dalam strategi militernya walaupun berkali kali Turki telah melakukan wacana intervensi militer pada tahun 2014 dan 2015 yang hanya menghasilkan operasi penyelamatan makam Sulaiman Syah yang dikelilingi wilayah ke gubernuran Aleppo.

Operasi ini melibatkan militer dan sifatnya sementara karena hanya bertujuan menyelamatkan aset milik negara Turki setelah mendapatkan ancaman oleh ISIS untuk dihancurkan. Ada dua penyebab kegagalan wacana, karena pertama Turki adalah anggota dan mengikat perintah dari NATO yang juga melawan tentara Bashar Al Assad dan ISIS, sehingga Turki memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi serangan udara yang dilancarkan oleh NATO. Dan yang kedua dikarenakan menjadi perdebatan bagi para dewan di parlemen yang tidak menginginkan pembengkakan anggaran setelah sebelumnya banyak digelontorkan untuk mempersenjatai oposisi dan masalah pengungsi Suriah. Barulah pada tahun 2016 disaat YPG mulai melancarkan ekspansi ke wilayah ISIS

dalam operasi yang dinamai Operasi Benteng Eufkrat atau (*Euphrates Shield Operation*) yang tujuan utamanya adalah membuat *Buffer Zone* atau zona bebas di sepanjang perbatas sebagai akses masuk para pengungsi.

Urgensitas Turki dalam Operasi benteng Eufkrat sebenarnya ditunjukkan kepada ISIS karena telah bertanggung jawab atas serangan bom di kota perbatasan Gaziantep yang mengakibatkan 55 orang meninggal, telah mengambil wilayah beberapa celah batas Suriah dan Turki (29 children killed in Gaziantep attack as death toll rises to 54, 2016). Serangan tersebut terjadi setelah ISIS berhasil mengambil sedikit celah diperbatasan Turki, di utara kota al-Bab. Celah ISIS di wilayah tersebut juga diperebutkan oleh tentara Kurdi secara agresif datang dari Timur di kota Manbij. Turki memerlukan gerak cepat jika pasukan YPG berhasil menguasai celah setidaknya ke gubernuran Afrin yang juga dikuasai oleh YPG dapat terhubung dengan wilayah utama Rojava disebelah timur.

Dalam operasi ini sebenarnya adalah operasi gabungan antara angkatan darat dan pasukan khusus Turki bersama Tentara Pembebasan Suriah. Bagi Tentara Pembebasan, celah tersebut tidak selayaknya dikuasai oleh militan kurdi karena mayoritas penduduknya adalah orang Arab. Kedua koalisi gabungan memulai operasi dimulai tanggal 24 Agustus 2016 pagi hari dan ditunjukkan ke kota Jarablus, dengan pasukan Turki sekitar 2.000 Tentara berserta alat tempur berat sedangkan Tentara Pembebasan dengan 10.000 pasukanya. Turki juga mendapatkan lampu hijau dari AS karena pada hari yang sama, wakil presiden AS, Joe Biden melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki serta berbicara keputusan Turki untuk melakukan operasi militer di Suriah. Setidaknya, YPG

tidak mengindahkan permintaan Reymond Thomas, komandan pasukan khusus AS untuk mengubah nama YPG karena telah dicap teroris oleh Turki.

Operasi tersebut berakhir Maret 2017 dan dimenangkan Pasukan Pembebasan bentukannya diawal konflik dan mampu merebut wilayah sepanjang 2000 km di kota al-Bab dari ketiga belah pihak terutama ISIS. Pada operasi ini, sebenarnya dapat pertentangan dari NATO dan AS yang tidak menginginkan Turki kontak senjata secara langsung dengan tentara Bashar Al Assad, terlebih AS selama ini juga membantu banyak pasukan YPG dan Kurdi lainnya dalam beberapa pertempuran seperti di Kobane yang membuat Ankara marah. (Dailymail, 2016).

Hasil kemenangan Turki dan koalisi membuat kota Afrin menjadi terjebak dan wilayah yang sangat empuk mendapatkan serangan dari Turki berserta koalisinya. Secara geografis, wilayah kontrol YPG di kegubernuran Afrin berbatasan dengan Turki secara langsung di utara dan barat, dan wilayah kontrol oposisi berada di selatan dan timur. Benar saja hal tersebut terjadi, 20 Januari 2018 Turki kembali melakukan operasi militer bersama pasukan pembebasan yang dinamai Operasi Ranting Zaitun (*Olive Branch Operation*) kota Afrin yang diberada dibawah kekuasaan Konfederasi Demokratik Suriah Utara setelah berubah nama dari Rojava. Pada operasi ini, Turki benar benar menargetkan militan kurdi dan koalisinya dibawah komando SDF. Turki beralasan operasi ini merupakan operasi penumpasan terhadap kelompok teroris, yang sebenarnya ditujukan kepada PKK yang turut membantu kebangkitan Rojava selama ini.

Pertahanan YPG sangat lemah di Afrin, karena pasukan Demokratik Suriah tidak banyak melakukan operasi di wilayah tersebut. Pasukan darat AS juga lebih banyak berada di sisi timur dalam membantu pasukan demokratik. Sedangkan pengaruh Rusia lebih banyak berada di wilayah ini. Rusia dan pasukan Arab Suriah hanya berusaha mencegah peperangan yang terjadi dengan membentuk zona penyangga tidak resmi. Turki melakukan gerak cepat dan dalam waktu 1,5 bulan Erdogan mengklaim telah melumpuhkan 3.213 militan serta menguasai 131 desa 31 kawasan strategis dan satu markas YPG. (Erdogan Klaim Turki Lumpuhkan 3.213 Milisi di Afrin, 2018)

Operasi ini masih berlangsung hingga sekarang, tetapi operasi ini tidak menggetarkan SDF untuk terus menggempur wilayah pertahanan ISIS, dan hingga sekarang wilayah Suriah utara sendiri sudah menguasai 25% wilayah Suriah. Dalam ekspedisi militer Operation Euphrate Shield dan Operation Olive Branch, menjadikan mutlak bahwa Turki mengambil langkah ekspedisi militer dalam strateginya menghadapi militan Kurdi yang terus berkembang dalam konflik Suriah. Dalam operasi ini juga, Turki tetap memanfaatkan tentara pembebasan suriah dalam pertempurannya melawan militan Kurdi, karena tentara pembebasan tetap menganggap orang kurdi sebagai mata mata dari Bashar al-Assad.

D. Hipotesa

Strategi Turki dalam menghadapi militan kurdi di perang suriah adalah sebagai berikut.

1. Turki memobilisasi Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* untuk membantu Turki dalam misi ekspedisi militer melawan militan Kurdi di Suriah dalam membangun *buffer zone* di sepanjang perbatasan Suriah-Turki
2. Turki melakukan ekspedisi militer langsung sebagai bagian dari Intervensi Turki terhadap Suriah, yang dinamai “Operation Euphrate Sheild” dan “Operation Olive Branch” dengan tujuan menguasai beberapa wilayah di Suriah yang dikuasai oleh Militan Kurdi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, :

1. Menjadi syarat tugas akhir kelulusan
2. Memberikan deskripsi strategi Turki dan kepentinganya dalam konflik Suriah
3. Menjelaskan kebangkitan militan Kurdi di Suriah dan ancaman kelompok tersebut bagi Turki.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian tidak melebar, penulis memberi rentan waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2018, yang memuat peristiwa Konflik Suriah dimulai dari awal mula pecahnya konflik, keterlibatan Turki dalam konflik, posisi dan

kebangkitan militan Kurdi dalam Perang Suriah hingga bagaimana kelompok ini mampu membuat Turki merasa terancam. Dalam penelitian ini juga penulis mungkin akan mengambil referensi dari tahun tahun sebelumnya untuk mendukung penguatan penelitian dan juga mengambil referensi di luar dari konflik Suriah seperti bagaimana arah politik luar negeri Turki dan juga keterikatan kelompok separatis PKK yang masih memiliki keterkaitan dengan YPG pada masa sebelum konflik maupun pada saat setelahnya.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan penerapan dan pola sistematis bagaimana suatu penelitian dapat diarahkan melalui prosedur ilmiah. Menurut (Bakry, 2016, hal. 9), Metodologi Penelitian adalah strategi penelitian yang menjelaskan bagaimana cara penelitian harus dilakukan dan antara lain mengidentifikasi metode yang digunakan penelitian, sehingga secara sederhana metodologi penelitian merupakan suatu prosedur desain untuk melaksanakan suatu penelitian.

Secara umum metodologi penelitian sosial dikelompokkan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat non numerik dengan mendalami sebuah makna, proses dan konteks sebuah perilaku dalam interaksi disebuah peristiwa tertentu, metode yang digunakan biasanya bersifat observasi dan menceburkan diri secara langsung sebagai sebuah subjek penelitian. Sedangkan Kualitatif merupakan penelitian dengan berdasarkan data numerik dengan penalaran objektif dan berfokus pada variabel-variabel. Dalam ilmu hubungan internasional penelitian kuantitatif memiliki sebutan sebagai penelitian

tradisionalis dengan mengedepankan suatu analogi historis sedangkan penelitian kualitatif sebagai penelitian behavioralis yang merupakan pengembangan dari penelitian tradisionalis dan lebih mengedepankan verifikasi dan falsifikasi atas dinamika yang terjadi dalam peristiwa hubungan internasional.

Sebagai penyaji fondasi teoritis, metodologi penelitian berkaitan dengan metode yang digunakan sebagai penentu instrumen, ukuran hasil penelitian dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengedepankan teknik pengumpulan literatur sebagai teknik pengumpulan data ilmiah dengan berbasiskan internet (*Internet Based Method*) sebagai sumber informasi yang meliputi Jurnal Penelitian, Dokumen Sekunder, Buku Elektronik (*Ebook*), maupun berita daring (*online*) baik berbentuk tulisan ataupun video reportasi, dan berbasis dokumen sekunder dengan akses materi tradisional yang bersumber dari Buku dan Jurnal Penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini menjadi karya ilmiah yang baik, penulis membuat sistematika penulisan agar mempermudah penulis dan juga agar penulisan disetiap bab terhubung hingga menjadi kesatuan utuh. Dalam penelitian ini,

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan yang dari tiap tiap komponen tersebut akan membawakan arahan dan gambaran umum bagaimana penelitian ini akan berjalan. Kerangka tersebut akan

membuat penelitian ini akan membuat bab-bab selanjutnya akan lebih terstruktur dan terarah.

BAB II Miliran Kurdi Dalam Perang Suriah dan Respon Turki

Bab ini akan menjelaskan kemunculan gerakan politik dan militan Kurdi dalam perkembangan perang saudara Suriah, beberapa tahun terjadinya perang. Meliputi politik Kurdistan Suriah dimasa sebelum konflik dan pada saat konflik berlangsung dalam menggagas Revolusi Rojava dan Signifikansi kemenangan di Kobane bagi Rojava. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana kemunculan Kurdistan Suriah ini sebagai ancaman bagi Turki yang dikaitkan dengan hubungan kelompok teror separatis kurdi yang berada di Turki.

BAB III Latar Belakang Perang Suriah dan Sikap Turki Dalam Perang Suriah

Dalam bab ini, penjelasan lebih pada latar belakang revolusi Suriah hingga jatuh menjadi perang saudara dan bagaimana keterlibatan Turki di dalamnya yang dimulai dari hubungan antara keduanya dilihat dari masa sebelum terjadinya konflik dan juga akan disertakan politik luar negeri Turki manakah yang akan digunakan hingga membuat Turki masuk dan terlibat dalam perang saudara ini.

BAB IV Strategi Turki Dalam Menghadapai Pasukan Kurdi di Suriah

Bab ini akan menjelaskan bagaimana Turki membuat strategi intervensi militer dengan mengeluarkan operasi militer “Euphrate Shield Operation” dan “Olive

Branch Operation” dalam menghadapi perkembangan wilayah militan Kurdi di Suriah.

BAB V Kesimpulan

Penulis akan menuliskan rangkuman dan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya pada bab ini.